

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN

Nomor : P.67/Menhut-II/2006
 Tanggal : 6 Nopember 2006
 Tentang : KRITERIA DAN STANDAR INVENTARISASI HUTAN

I. INVENTARISASI HUTAN TINGKAT NASIONAL

1. Sasaran/Obyek Kegiatan : Kawasan hutan / hutan negara dan hutan hak
2. Penyelenggara/ Penanggung jawab : Menteri
3. Pembinaan dan Pengendalian : Menteri
4. Pelaksana : Badan Planologi Kehutanan

NO.	KRITERIA	STANDAR
	Pelaksanaan :	
1.	Waktu	Dilaksanakan paling sedikit satu kali dalam 5 tahun
a.	Penginderaan Jauh	Citra satelit dan non satelit dengan resolusi rendah (50 – 250) m sampai sedang (10 – 50) m
	1) Spesifikasi Citra	Spesifikasi Citra yang Digunakan sbb : a) Format data Geo tiff, atau format lain sesuai ketentuan yang berlaku b) Koreksi : Telah dikoreksi secara geomatrik dan radiomatrik c) Datum : WGS 84 d) Sistem Koordinat : UTM (Universal Transverse Mercator), disertai sistem koordinat geografis e) Media perekaman data : CD ROM, DVD atau jenis media lain sesuai perkembangan teknologi f) Liputan : 2 tahun terakhir g) Tutupan awan : $\leq 10\%$, kecuali apabila selama 2 tahun terakhir tidak tersedia citra dengan tutupan awan maksimum $\leq 10\%$
	2) Metode	Penafsiran citra dilakukan sebagai berikut : Kelas Penutupan Lahan : Kelas penutupan lahan yang digunakan sesuai kelas penutupan lahan yang ditetapkan Badan Planologi Kehutanan. Klasifikasi dilakukan secara : a) Manual dan Visual : (1) delinasi pada citra dilayar komputer (on screen digitizing/semi digital) (2) delinasi pada citra hardcopy/cetakan yang sudah dikoreksi secara orthogonal b) Digital : Klasifikasi ulang : Untuk memperbaiki hasil klasifikasi pendahuluan, dilakukan klasifikasi ulang berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan atau data sekunder yang tersedia.

	3) Verifikasi Data	<p>a) Verifikasi data hasil penafsiran dilakukan dengan cara :</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Peninjauan langsung ke lapangan (ceking lapangan). Biasanya intensitas sampling dalam pelaksanaan cheking lapangan ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian yang diinginkan, minimal satu sample pada setiap kelas penutupan lahan. (2) Merujuk hasil penafsiran citra lain yang memiliki resolusi lebih tinggi (memiliki tingkat akurasi dan nilai kebenaran lebih baik) (3) Merujuk pada data sekunder dengan standar yang sesuai <p>b) Tingkat kebenaran/ akurasi hasil penafsiran dihitung dan disajikan berdasarkan data hasil cheking lapangan dan atau berdasarkan data sekunder yang digunakan</p>
	4) Pengelolaan data	<p>Badan Planologi Kehutanan menyusun basis data citra dan data spasial Departemen Kehutanan, dengan demikian setiap unit kerja yang melaksanakan inventarisasi penginderaan jauh menggunakan data citra atau teknologi penginderaan jauh agar :</p> <ol style="list-style-type: none"> a) Menyerahkan copy data citra dan data spasial hasil kegiatan yang dimiliki kepada Badan Planologi Kehutanan untuk dimasukkan ke basis data Departemen Kehutanan b) Data digital citra satelit dan data spasial disimpan dalam format dan media penyimpan yang telah ditetapkan dan dibuat rangkap sebagai back up
	5) Penyajian Hasil	Peta penutupan lahan dengan skala minimal 1 : 1.000.000 dan data non spasial sebagai produk ikutan.
	b. Terrestis	Data survei lapangan
	1) Inventarisasi tegakan hutan	Data inventarisasi pohon dan tingkat permudaannya yang ada dalam petak ukur
	a) Metode	<ol style="list-style-type: none"> a) Bentuk petak ukur : lingkaran, persegi empat, titik, dan jalur b) Cara sampling : minimal intensitas sampling 0,0025%
	b) Peta kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan dalam peta skala terbesar yang tersedia minimal dalam skala 1 : 250.000, yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG atau Peta Dasar Kehutanan.
	c) Penentuan lokasi petak ukur	Penentuan lokasi petak ukur dilakukan dengan mengukur koordinat titik ikat dilapangan menggunakan GPS, atau mengukur ikatan ke titik pasti misalnya titik triangulasi.
	d) Pengumpulan data dan informasi	Dilaksanakan melalui : pengukuran, pengamatan dan pencatatan data primer dan/atau pengumpulan data sekunder.
	(1) Tipe Hutan	Pengamatan terhadap tipe hutan yang dibedakan menjadi : hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, hutan pantai), hutan rawa gambut, hutan rawa dan hutan payau/mangrove.
	(2) Pohon	<ol style="list-style-type: none"> a) Dikelompokkan pohon jika berdiameter 20 cm ke atas. b) Dilakukan penomoran dan pemetaan pohon. c) Pencatatan/pengukuran nama lokal, diameter dan tinggi pohon. d) Pengambilan herbarium untuk jenis-jenis yang belum dikenal/belum diketahui namanya.

	(3) Tingkat permudaan/ anakan	<p>a) Tingkat permudaan/anakan dikelompokkan menjadi semai (tinggi sampai dengan 1,5 m), pancang (tinggi lebih dari 1,5 m dan diameter kurang dari 5 cm) dan tiang (diameter 5-19 cm).</p> <p>b) Pencatatan nama lokal dan jumlah setiap jenis semai dan pancang.</p> <p>c) Pencatatan nama lokal dan pengukuran diameter untuk tingkat tiang.</p> <p>d) Pengambilan herbarium untuk jenis-jenis yang belum dikenal/ belum diketahui namanya.</p>
	(4) Topografi	<p>Dilakukan pengukuran/ pengamatan/ pencatatan terhadap :</p> <p>a) Ketinggian di atas permukaan laut</p> <p>b) Kelerengan</p> <p>c) Arah kelerengan</p> <p>d) Hamparan</p> <p>e) Amplitudo</p> <p>Apabila dimungkinkan digambarkan dalam unit DAS/Sub DAS</p>
	(5) Tanah	<p>Dilakukan pengamatan terhadap :</p> <p>a) Jenis tanah</p> <p>b) Warna tanah</p> <p>c) Tekstur tanah</p> <p>d) Tanah berbatu atau tidak</p> <p>e) Tingkat kerentanan terhadap erosi</p>
	e) Penyajian Hasil	<p>a) Data pohon dan tingkat permudaannya terdiri dari : potensi (per jenis, kelompok jenis dan tegakan kayu), penyebaran, struktur tegakan, status kelangkaan dan populasi pohon.</p> <p>b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 500.000</p>
	2) Inventarisasi tumbuhan non kayu	<p>Survei dan atau kompilasi hasil inventarisasi tumbuhan non kayu yang ada dalam petak ukur seperti rotan, sagu, bambu, nipah dan lain-lain.</p>
	a) Metode	<p>a) Bentuk plot : lingkaran atau persegi empat.</p> <p>b) Cara sampling :</p> <p>(1) Inventarisasi tumbuhan non kayu yang dilakukan sekaligus inventarisasi sumberdaya hutan kayu, intensitas samplingnya mengikuti petak ukur inventarisasi sumber daya hutan kayu.</p> <p>(2) Inventarisasi tumbuhan non kayu yang dilakukan secara khusus menggunakan intensitas sampling :</p> <p>(a) rotan, minimal intensitas sampling 0,5%.</p> <p>(b) bambu, minimal intensitas sampling 0,05%.</p> <p>(c) sagu, minimal intensitas sampling 2%.</p> <p>(d) nipah, minimal intensitas sampling 0,05%.</p> <p>c) Sampling tumbuhan non kayu lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan</p>
	b) Peta Kerja	<p>Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan minimal dalam skala 1 : 250.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG.</p>
	c) Penentuan lokasi petak ukur	<p>Penentuan lokasi petak ukur dilakukan dengan mengukur koordinat titik ikat di lapangan menggunakan GPS, atau mengukur ikatan ke titik pasti misalnya titik triangulasi.</p>
	d) Pengumpulan data dan	<p>Dilaksanakan melalui : pengukuran, pengamatan dan</p>

	informasi	pencatatan data primer dan atau pengumpulan data sekunder.
	(1) Tipe Hutan	Pengamatan terhadap tipe hutan yang dibedakan menjadi : hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah dan hutan pantai), hutan gambut, hutan rawa dan hutan payau/mangrove.
	(2) Topografi	Dilakukan pengukuran/ pengamatan/ pencatatan terhadap : a) Ketinggian di atas permukaan laut b) Kelerengan c) Arah kelerengan d) Hampanan e) Amplitudo Apabila dimungkinkan digambarkan dalam unit DAS/Sub DAS
	(3) Tanah	Dilakukan pengamatan terhadap : a) Jenis tanah b) Warna tanah c) Tekstur tanah d) Tanah berbatu atau tidak e) Tingkat kerentanan terhadap erosi
	(4) Tumbuhan non kayu	a) Dilakukan pengukuran dan pencatatan parameter terhadap tumbuhan non kayu yang ada dalam plot seperti : (1) Rotan terdiri dari nama species, jumlah batang, jumlah rumpun, diameter (d), panjang (p) dan Berat basah (Bb) serta permudaannya. (2) Bambu terdiri dari nama species, jumlah batang, jumlah rumpun, tinggi untuk jenis monopodial serta permudaannya. (3) Sagu terdiri dari nama species, jumlah batang, diameter dan tinggi pohon bebas pelepah serta permudaannya. (4) Nipah terdiri dari nama species, jumlah batang, malai/tandan, buah dan tangkai daun serta permudaannya. b) Apabila diperlukan inventarisasi hutan khusus non kayu lainnya dapat dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan
	e) Penyajian Hasil	a) Data tumbuhan non kayu terdiri dari : potensi jenis (termasuk permudaannya), penyebaran, status kelangkaan, populasi dan nilai ekonomis tumbuhan non kayu. b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 500.000
	3) Inventarisasi Satwa Liar	Data survei lapangan dan/atau kompilasi hasil inventarisasi satwa liar
	a) Metode	Kompilasi hasil identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi jenis, penyebaran, status kelangkaan, populasi, dan habitat satwa liar
	b) Waktu Pelaksanaan	Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun
	c) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan dalam peta skala terbesar yang tersedia minimal dalam skala 1 : 250.000, yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG atau Peta Dasar Kehutanan.
	d) Penentuan lokasi petak ukur	Penentuan lokasi petak ukur dilakukan dengan mengukur koordinat titik ikat di lapangan menggunakan GPS, atau mengukur ikatan ke titik pasti misalnya titik triangulasi.

	e) Pengumpulan data dan informasi	Dilaksanakan melalui : pengukuran, pengamatan dan pencatatan data primer dan atau pengumpulan data sekunder.
	(1) Tipe Ekosistem	Pengamatan terhadap tipe ekosistem yang dibedakan menjadi : hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, hutan pantai), hutan gambut, hutan rawa, hutan payau/mangrove dan kawasan perairan.
	(2) Jenis Satwa Liar	Dilakukan pencatatan terhadap jenis, ukuran, jenis kelamin, usia dan kelompok famili satwa liar berikut data identifikasi jenis yang meliputi ukuran dan warna spesifik.
	(3) Penyebaran satwa Liar	Dilakukan pencatatan terhadap posisi perjumpaan untuk penyebaran dari jenis satwa liar dan bila memungkinkan dapat diplotkan dalam peta
	(4) Status kelangkaan	Dilakukan pencatatan terhadap status kelangkaan yang dikaitkan dengan kelimpahan dari populasi
	(5) Topografi	Dilakukan pencatatan terhadap ketinggian di atas permukaan laut dan kelengkapan
	(6) Habitat	Kondisi habitat, iklim, suhu, kelembaban, prosentase penutupan tajuk
	f) Penyajian Hasil	a) Data satwa liar terdiri dari : potensi per jenis, keanekaragaman jenis, penyebaran termasuk status kelangkaan dan informasi habitat (antara lain sarang dan daerah jelajah), seks ratio b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 1.000.000.
	4) Inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya	Survei dan atau kompilasi data hasil inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal/ masyarakat adat di dalam dan di sekitar kawasan hutan antara lain mengenai adat istiadat, pola ketergantungan terhadap hutan, pola kelembagaan, infra struktur dari desa disekitar lokasi plot baik berupa data primer maupun sekunder.
	a) Metode	Survei lapangan atau kompilasi data dapat menggunakan sampling/ contoh, kegiatan lapangan melalui observasi, wawancara dan pencatatan/ perekaman, serta pengolahan dan analisa data.
	b) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi sossebud masyarakat lokal/masyarakat adat dan disajikan minimal dalam skala 1 : 250.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG.
	c) Penentuan lokasi sampling	Lokasi sampling adalah desa-desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan
	d) Pengumpulan data dan informasi	Dilaksanakan melalui pencatatan/perekaman data sekunder, pengamatan lapangan dan wawancara dengan responden terpilih menggunakan kuesioner dan atau pengumpulan data sekunder.
	e) Penyajian Hasil	a) Data dan hasil analisa sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di dalam dan di sekitar hutan. b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 500.000
2.	Data dan informasi hasil inventarisasi hutan tingkat Nasional	a) Keadaan status dan fungsi kawasan hutan b) kondisi fisik kawasan hutan antara lain topografi, tanah, dan iklim. c) Informasi DAS dan SUB DAS. d) Keadaan penutupan lahan. e) Potensi sumberdaya hutan kayu berupa pohon dan tingkat

		<p>permudaannya meliputi jenis dan pengelompokan kayu (seperti jenis niagawi, kelas diameter dan lain-lain), volume pohon/massa tegakan, jumlah batang, penyebaran, status kelangkaan dan populasi.</p> <p>f) Potensi sumberdaya hutan tumbuhan non kayu meliputi jenis dan pengelompokan jenis, volume/berat, jumlah batang/rumpun, penyebaran, status kelangkaan, populasi dan nilai ekonomis tumbuhan non kayu.</p> <p>g) Potensi satwa liar meliputi jenis/sub jenis, pengelompokan jenis antara lain berdasarkan perlindungan jenis satwa liar, penyebaran, status kelangkaan dan populasi baik in situ maupun eks situ.</p> <p>h) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan.</p> <p>i) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 500.000.</p>
3.	Pelaporan	
	1) Isi Laporan	<p>Isi laporan minimal memuat :</p> <p>a) Peta Pemandangan.</p> <p>b) Kata Pengantar ditandatangani oleh pimpinan instansi penyelenggara atau Pembina Penanggungjawab Kegiatan</p> <p>c) Susunan Tim.</p> <p>d) Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.</p> <p>e) Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Pelaksanaan, Ruang Lingkup dan Batasan Istilah.</p> <p>f) Keadaan Kawasan terdiri dari Lokasi (luas dan letak), Risalah Kawasan, Kondisi Biogeofisik, Kondisi sosekbud.</p> <p>g) Metoda</p> <p>h) Hasil Pelaksanaan dan Pengolahan Data.</p> <p>i) Analisa</p> <p>j) Kesimpulan dan Saran</p> <p>k) Daftar Pustaka</p> <p>l) Lampiran-lampiran antara lain peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 500.000.</p>
	2) Arus Pelaporan	<p>a) Hasil pelaksanaan inventarisasi hutan dilaporkan kepada Kepala Badan Planologi Kehutanan.</p> <p>b) Kompilasi hasil inventarisasi hutan nasional dilaporkan kepada Menteri.</p>

II. INVENTARISASI HUTAN TINGKAT PROVINSI

1. Sasaran/Obyek Kegiatan : 1. Kawasan hutan di wilayah Provinsi mencakup TAHURA, kawasan hutan lindung dan hutan produksi
2. Areal penggunaan lain (APL) yang berhutan (hutan hak) seperti hutan rakyat
2. Penyelenggara/ Penanggung jawab : Gubernur
3. Pembinaan dan Pengendalian : Badan Planologi Kehutanan, Ditjen PHKA, Ditjen RLPs dan Ditjen BPK
4. Pelaksana : Dinas Provinsi

NO.	KRITERIA	STANDAR
	Pelaksanaan :	
1.	Waktu Pelaksanaan	a) Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun b) Kurang dari 5 tahun apabila terjadi perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata
a.	Penginderaan Jauh	Citra satelit dan non satelit dengan resolusi tinggi (4-10) m atau sedang (10-50) m
	1) Spesifikasi Citra	Spesifikasi Citra yang Digunakan sbb : a) Format data Geo tiff, atau format lain sesuai ketentuan yang berlaku b) Koreksi : Telah dikoreksi secara geomatrik dan radiomatrik c) Datum : WGS 84 d) Sistem Koordinat : UTM (Universal Transverse Mercator), disertai sistem koordinat geografis e) Media perekaman data : CD ROM, DVD atau jenis media lain sesuai perkembangan teknologi f) Liputan : 2 tahun terakhir g) Tutupan awan : $\leq 10\%$, kecuali apabila selama 2 tahun terakhir tidak tersedia citra dengan tutupan awan maksimum $\leq 10\%$
	2) Metode	Penafsiran citra dilakukan sebagai berikut : Kelas Penutupan Lahan : Kelas penutupan lahan yang digunakan sesuai kelas penutupan lahan yang ditetapkan Badan Planologi Kehutanan. Klasifikasi dilakukan secara : a) Manual : (1) delinasi pada citra dilayar komputer (on screen digitizing/semi digital) (2) delinasi pada citra hardcopy/cetakan yang sudah dikoreksi secara orthogonal b) Digital : Klasifikasi ulang : Untuk memperbaiki hasil klasifikasi pendahuluan, dilakukan klasifikasi ulang berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan atau data sekunder yang tersedia.
	3) Verifikasi Data	a) Verifikasi data hasil penafsiran dilakukan dengan cara :

		<p>(1) Peninjauan langsung ke lapangan (ceking lapangan). Besarnya intensitas sampling dalam pelaksanaan cheking lapangan ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian yang diinginkan, minimal satu sample pada setiap kelas penutupan lahan.</p> <p>(2) Merujuk hasil penafsiran citra lain yang memiliki resolusi lebih tinggi (memiliki tingkat akurasi dan nilai kebenaran lebih baik)</p> <p>(3) Merujuk pada data sekunder dengan standar yang sesuai</p> <p>b) Tingkat kebenaran/ akurasi hasil penafsiran dihitung dan disajikan berdasarkan data hasil cheking lapangan dan atau berdasarkan data sekunder yang digunakan</p>
	4) Pengelolaan data	<p>Badan Planologi Kehutanan menyusun basis data citra dan data spasial Departemen Kehutanan, dengan demikian setiap unit kerja yang melaksanakan inventarisasi penginderaan jauh menggunakan data citra atau teknologi penginderaan jauh agar :</p> <p>a) Menyerahkan copy data citra dan data spasial hasil kegiatan yang dimiliki kepada Badan Planologi Kehutanan untuk dimasukkan ke basis data Departemen Kehutanan</p> <p>b) Data digital citra satelit dan data spasial disimpan dalam format dan media penyimpan yang telah ditetapkan dan dibuat rangkap sebagai back up</p>
	5) Penyajian Hasil	Peta penutupan lahan dengan skala minimal 1 : 500.000 dan data non spasial sebagai produk ikutan.
b.	Inventarisasi Terrestis	Dilakukan melalui survei atau kompilasi data hasil inventarisasi hutan atau kombinasi antara survei dan kompilasi.
	1) Inventarisasi Sumberdaya Hutan Kayu	Survei dan atau kompilasi hasil data inventarisasi pohon dan tingkat permudaannya yang ada dalam petak ukur
	a) Metoda	<p>a) Bentuk plot : bisa lingkaran atau persegi empat.</p> <p>b) Cara sampling : minimal intensitas sampling sebesar 0,01%.</p> <p>c) Mengacu pada kriteria dan standar Inventarisasi Hutan Nasional</p>
	b) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan minimal dalam skala 1: 250.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG.
	c) Lokasi plot	Penentuan lokasi sampling plot dilakukan dengan mengukur koordinat titik ikat di lapangan menggunakan GPS
	d) Pengumpulan data dan informasi	Dilaksanakan melalui : pengukuran, pengamatan dan pencatatan parameter di lapangan serta data sekunder yang tersedia.
	(1) Tipe Hutan	Pengamatan terhadap tipe hutan yang dibedakan menjadi : hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, hutan pantai), hutan gambut, hutan rawa, hutan payau/mangrove, hutan tanaman dan hutan rakyat.
	(2) Pohon	<p>a) Dikelompokkan sebagai pohon jika berdiameter 20 cm keatas</p> <p>b) Dilakukan penomoran pohon</p> <p>c) Pencatatan nama lokal pohon, diameter, tinggi pohon, tinggi bebas cabang, kondisi pohon</p>

		d) Pengambilan herbarium untuk jenis-jenis yang belum dikenal atau diketahui namanya.
	(3)Tingkat permudaan/ anakan	a) Tingkat permudaan/anakan dikelompokkan menjadi semai, pancang dan tiang. b) Pencatatan nama lokal dan jumlah jenis untuk semai dan pancang. c) Pencatatan nama lokal, diameter dan jumlah jenis untuk tingkat tiang. d) Untuk hutan tanaman mengikuti kelompok jenis dan kelas umur.
	(4)Topografi	Dilakukan pengukuran/ pengamatan/ pencatatan terhadap : a) Ketinggian di atas permukaan laut b) Kelerengan c) Arah kelerengan d) Hamparan e) Amplitudo Apabila dimungkinkan digambarkan dalam unit DAS/Sub DAS
	(5)Tanah	Dilakukan pengamatan terhadap : a) Jenis tanah b) Warna tanah c) Tekstur tanah d) Tanah berbatu atau tidak e) Tingkat kerentanan terhadap erosi
	e) Penyajian Hasil	a) Data pohon dan tingkat permudaannya terdiri dari : potensi (per jenis, kelompok jenis dan tegakan kayu), penyebaran, struktur tegakan, status kelangkaan dan populasi pohon. b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 250.000
	2) Inventarisasi Tumbuhan Non Kayu	Survei dan atau Kompilasi hasil inventarisasi tumbuhan non kayu yang ada dalam petak ukur seperti rotan, sagu, bambu, nipah dan lain-lain.
	a) Metoda	a) Bentuk plot : lingkaran atau persegi empat. b) Cara sampling : (1) Inventarisasi tumbuhan non kayu yang dilakukan sekaligus inventarisasi sumberdaya hutan kayu, intensitas samplingnya mengikuti petak ukur inventarisasi sumber daya hutan kayu. (2) Inventarisasi tumbuhan non kayu yang dilakukan secara khusus menggunakan intensitas sampling : (a) rotan, minimal intensitas sampling 0,5%. (b) bambu, minimal intensitas sampling 0,05%. (c) sagu, minimal intensitas sampling 2%. (d) nipah, minimal intensitas sampling 0,05%. c) Sampling tumbuhan non kayu lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan d) Mengacu pada pedoman Inventarisasi Hutan Nasional
	b) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan minimal skala 1 : 250.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG.
	c) Lokasi Plot	Penentuan lokasi sampling plot dilakukan dengan mengukur koordinat titik ikat di lapangan menggunakan GPS

	d) Pengumpulan data dan informasi	Dilaksanakan melalui : pengukuran, pengamatan dan pencatatan parameter di lapangan serta data sekunder yang tersedia.
	(1) Tipe Hutan	Pengamatan terhadap tipe hutan yang dibedakan menjadi : hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah dan hutan pantai), hutan gambut, hutan rawa, hutan payau/mangrove dan hutan tanaman.
	(2) Topografi	Dilakukan pengukuran/ pengamatan/ pencatatan terhadap : a) Ketinggian di atas permukaan laut b) Kelerengan c) Arah kelerengan d) Hamparan e) Amplitudo Apabila dimungkinkan digambarkan dalam unit DAS/Sub DAS
	(3) Tanah	Dilakukan pengamatan terhadap : a) Jenis tanah b) Warna tanah c) Tekstur tanah d) Tanah berbatu atau tidak e) Tingkat kerentanan terhadap erosi
	(4) Tumbuhan non kayu	a) Dilakukan pengukuran dan pencatatan parameter terhadap tumbuhan non kayu yang ada dalam plot seperti : (1) Rotan terdiri dari nama species, jumlah batang, jumlah rumpun, diameter (d), panjang (p) dan Berat basah (Bb) serta permudaannya. (2) Bambu terdiri dari nama species, jumlah batang, jumlah rumpun, tinggi untuk jenis monopodial serta permudaannya. (3) Sagu terdiri dari nama species, jumlah batang, diameter dan tinggi pohon bebas pelepah serta permudaannya. (4) Nipah terdiri dari nama species, jumlah batang, malai/tandan, buah dan tangkai daun serta permudaannya. b) Apabila diperlukan inventarisasi hutan khusus non kayu lainnya dapat dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan
	e) Penyajian Hasil	a) Data tumbuhan non kayu terdiri dari : potensi jenis (termasuk permudaannya), penyebaran, status kelangkaan, populasi dan nilai ekonomis tumbuhan non kayu. b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 250.000
	3) Inventarisasi Sosial, Ekonomi dan Budaya	Survei dan atau kompilasi data hasil inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal/ masyarakat adat di sekitar kawasan hutan antara lain mengenai adat istiadat, pola ketergantungan terhadap hutan, pola kelembagaan dan infra struktur dari desa disekitar lokasi plot baik berupa data primer maupun sekunder.
	a) Metode	Survei lapangan atau kompilasi data menggunakan sampling/ contoh, kegiatan lapangan melalui observasi, wawancara dan pencatatan/ perekaman, serta pengolahan dan analisa data.
	b) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi sosbud masyarakat lokal/masyarakat adat dan disajikan minimal skala 1 : 250.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi

		atau peta JOG.
	c) Penentuan lokasi sampling	Lokasi sampling adalah desa-desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan
	d) Pengumpulan data dan informasi	Dilaksanakan melalui pencatatan/perekaman data sekunder, pengamatan lapangan dan wawancara dengan responden terpilih menggunakan kuesioner dan atau pengumpulan data sekunder.
	e) Penyajian Hasil	a) Data dan hasil analisa sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan. b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 250.000
2.	Data dan informasi hasil inventarisasi hutan tingkat Provinsi	a) Keadaan status dan fungsi kawasan hutan b) kondisi fisik kawasan hutan antara lain topografi, tanah, dan iklim. c) Informasi DAS dan SUB DAS. d) Keadaan penutupan lahan. e) Potensi sumberdaya hutan pada hutan alam dan hutan tanaman berupa kayu/pohon dan tingkat permudaannya meliputi jenis dan pengelompokan kayu (seperti jenis niagawi, kelas diameter dan lain-lain), volume pohon/massa tegakan, jumlah batang, penyebaran, struktur tegakan, status kelangkaan dan populasi termasuk hutan rakyat. f) Potensi sumberdaya hutan tumbuhan non kayu meliputi jenis dan pengelompokan jenis, volume/berat, jumlah batang/rumpun, penyebaran, status kelangkaan, populasi dan nilai ekonomis tumbuhan non kayu termasuk hutan rakyat. g) Potensi satwa liar meliputi jenis/sub jenis, pengelompokan jenis antara lain berdasarkan perlindungan jenis satwa liar, penyebaran, status kelangkaan dan populasi baik in situ maupun eks situ. h) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan. i) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 250.000.
3.	Pelaporan	
	1) Isi Laporan	Isi laporan minimal memuat : a) Peta Pemandangan. b) Kata Pengantar ditandatangani oleh pimpinan instansi penyelenggara atau Pembina Penanggungjawab Kegiatan c) Susunan Tim. d) Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran. e) Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Pelaksanaan, Ruang Lingkup dan Batasan Istilah. f) Keadaan Kawasan terdiri dari Lokasi (luas dan letak), Risalah Kawasan, Kondisi Biogeofisik, Kondisi sosekbud. g) Metoda h) Hasil Pelaksanaan dan Pengolahan Data. i) Analisa j) Kesimpulan dan Saran

		k) Daftar Pustaka l) Lampiran-lampiran antara lain peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 250.000.
	2) Arus Pelaporan	Hasil inventarisasi hutan tingkat provinsi dilaporkan kepada Pusat (Badan Planologi Kehutanan) dengan berkoordinasi Balai Pemantapan Kawasan Hutan.

III. INVENTARISASI HUTAN TINGKAT KABUPATEN / KOTA

1. Sasaran/Obyek Kegiatan : 1. Kawasan hutan lindung dan hutan produksi di wilayah kabupaten/kota
2. Areal penggunaan lain (APL) yang berhutan seperti hutan rakyat dan hutan kota
2. Penanggung jawab : Bupati / Walikota
3. Pengendalian dan Pembinaan : Dinas Provinsi
4. Penyelenggara : Dinas Kabupaten/Kota

NO.	KRITERIA	STANDAR
	Pelaksanaan :	
1.	Waktu Pelaksanaan	a) Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun b) Kurang dari 5 tahun apabila terjadi perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata
a.	Penginderaan Jauh	Citra satelit dan non satelit dengan resolusi sangat tinggi (1-4) m atau tinggi (4-10) m atau sedang (10-50) m
	1) Spesifikasi Citra	Spesifikasi Citra yang Digunakan sbb : a) Format data Geo tiff, atau format lain sesuai ketentuan yang berlaku b) Koreksi : Telah dikoreksi secara geomatrik dan radiomatrik c) Datum : WGS 84 d) Sistem Koordinat : UTM (Universal Transverse Mercator), disertai sistem koordinat geografis e) Media perekaman data : CD ROM, DVD atau jenis media lain sesuai perkembangan teknologi f) Liputan : 2 tahun terakhir g) Tutupan awan : $\leq 10\%$, kecuali apabila selama 2 tahun terakhir tidak tersedia citra dengan tutupan awan maksimum $\leq 10\%$
	2) Metode	Penafsiran citra dilakukan sebagai berikut : Kelas Penutupan Lahan : Kelas penutupan lahan yang digunakan sesuai kelas penutupan lahan yang ditetapkan Badan Planologi Kehutanan. Klasifikasi dilakukan secara : a) Manual : (1) delinasi pada citra dilayar komputer (on screen digitizing/semi digital) (2) delinasi pada citra hardcopy/cetakan yang sudah

		<p>dikoreksi secara orthogonal</p> <p>b) Digital :</p> <p>Klasifikasi ulang :</p> <p>Untuk memperbaiki hasil klasifikasi pendahuluan, dilakukan klasifikasi ulang berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan atau data sekunder yang tersedia.</p>
	3) Verifikasi Data	<p>a) Verifikasi data hasil penafsiran dilakukan dengan cara :</p> <p>(1) Peninjauan langsung ke lapangan (ceking lapangan). Besarnya intensitas sampling dalam pelaksanaan cheking lapangan ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian yang diinginkan, minimal satu sample pada setiap kelas penutupan lahan.</p> <p>(2) Merujuk hasil penafsiran citra lain yang memiliki resolusi lebih tinggi (memiliki tingkat akurasi dan nilai kebenaran lebih baik)</p> <p>(3) Merujuk pada data sekunder dengan standar yang sesuai</p> <p>b) Tingkat kebenaran/ akurasi hasil penafsiran dihitung dan disajikan berdasarkan data hasil cheking lapangan dan atau berdasarkan data sekunder yang digunakan</p>
	4) Pengelolaan data	<p>Badan Planologi Kehutanan menyusun basis data citra dan data spasial Departemen Kehutanan, dengan demikian setiap unit kerja yang melaksanakan inventarisasi penginderaan jauh menggunakan data citra atau teknologi penginderaan jauh agar :</p> <p>a) Menyerahkan copy data citra dan data spasial hasil kegiatan yang dimiliki kepada Badan Planologi Kehutanan untuk dimasukkan ke basis data Departemen Kehutanan</p> <p>b) Data digital citra satelit dan data spasial disimpan dalam format dan media penyimpan yang telah ditetapkan dan dibuat rangkap sebagai back up</p>
	5) Penyajian Hasil	Peta penutupan lahan dengan skala minimal 1 : 250.000 dan data non spasial sebagai produk ikutan.
b.	Inventarisasi Terrestri :	Dilakukan melalui survei atau kompilasi data hasil inventarisasi hutan atau kombinasi antara survei dan kompilasi.
	1) Inventarisasi Sumberdaya Hutan Kayu	Survei dan atau kompilasi hasil data inventarisasi pohon dan tingkat permudaannya yang ada dalam petak ukur
	a) Metoda	<p>a) Bentuk plot : bisa lingkaran atau persegi empat.</p> <p>b) Cara sampling : minimal intensitas sampling sebesar 0,1%.</p> <p>c) Mengacu pada kriteria dan standar Inventarisasi Hutan Nasional</p>
	b) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan minimal dalam skala 1 : 100.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG atau peta hasil pemetaan fotografis atau dengan teknologi lainnya.
	c) Lokasi plot	Penentuan lokasi sampling plot dilakukan dengan mengukur koordinat titik ikat di lapangan menggunakan GPS
	d) Pengumpulan data dan informasi	Dilakukan melalui pengukuran, pengamatan dan pencatatan parameter di lapangan serta pengumpulan data sekunder.
	(1) Tipe Hutan	Pengamatan terhadap tipe hutan yang dibedakan menjadi :

		hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, hutan pantai), hutan gambut, hutan rawa, hutan payau/mangrove, hutan tanaman dan hutan rakyat, hutan kota dan lain-lain.
	(2) Pohon	<ul style="list-style-type: none"> a) Dikelompokkan sebagai pohon jika berdiameter 20 cm keatas b) Dilakukan penomoran pohon c) Pencatatan nama lokal pohon, diameter, tinggi pohon, tinggi bebas cabang d) Pengambilan herbarium untuk jenis-jenis yang belum dikenal atau diketahui namanya e) Untuk hutan tanaman mengikuti kelompok jenis dan kelas umur
	(3) Tingkat permudaan/ anakan	<ul style="list-style-type: none"> a) Tingkat permudaan/anakan dikelompokkan menjadi semai, pancang dan tiang. b) Pencatatan nama lokal dan jumlah jenis untuk semai dan pancang. c) Pencatatan nama lokal, diameter dan jumlah jenis untuk tingkat tiang. d) Untuk hutan tanaman mengikuti kelompok jenis dan kelas umur. <p>Mengacu kriteria dan standar inventarisasi hutan nasional</p>
	(4) Topografi	<ul style="list-style-type: none"> a) Ketinggian di atas permukaan laut b) Kelerengan c) Arah kelerengan d) Hampanan e) Amplitudo <p>Apabila dimungkinkan digambarkan dalam unit DAS/Sub DAS</p>
	(5) Tanah	<p>Dilakukan pengamatan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jenis tanah b) Warna tanah c) Tekstur tanah d) Tanah berbatu atau tidak e) Tingkat kerentanan terhadap erosi
	e) Penyajian Hasil	<ul style="list-style-type: none"> a) Data pohon dan tingkat permudaannya terdiri dari : potensi (per jenis, kelompok jenis dan massa/tegakan kayu), penyebaran, status kelangkaan, populasi dan struktur tegakan antara lain pada hutan alam, hutan tanaman, hutan rakyat dan hutan kota. b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 100.000
	2) Inventarisasi Tumbuhan Non Kayu	Survei dan atau Kompilasi hasil inventarisasi tumbuhan non kayu yang ada dalam petak ukur seperti rotan, sagu, bambu, nipah dan lain-lain.
	a) Metoda	<ul style="list-style-type: none"> a) Bentuk plot : lingkaran atau persegi empat. b) Cara sampling : <ul style="list-style-type: none"> (1) Inventarisasi tumbuhan non kayu yang dilakukan sekaligus inventarisasi sumberdaya hutan kayu, intensitas samplingnya mengikuti petak ukur inventarisasi sumber daya hutan kayu. (2) Inventarisasi tumbuhan non kayu yang dilakukan secara

		<p>husus menggunakan intensitas sampling :</p> <p>(a) rotan, minimal intensitas sampling 0,5%.</p> <p>(b) bambu, minimal intensitas sampling 0,05%.</p> <p>(c) sagu, minimal intensitas sampling 2%.</p> <p>(d) nipah, minimal intensitas sampling 0,05%.</p> <p>c) Sampling tumbuhan non kayu lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan</p> <p>d) Mengacu pada pedoman Inventarisasi Hutan Nasional</p>
	b) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan minimal skala 1 : 100.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG.
	c) Lokasi Plot	Penentuan lokasi sampling plot dilakukan dengan mengukur koordinat titik ikat di lapangan menggunakan GPS
	d) Pengumpulan data dan informasi	Dilaksanakan melalui : pengukuran, pengamatan dan pencatatan parameter di lapangan serta pengumpulan data sekunder.
	(1) Tipe Hutan	Pengamatan terhadap tipe hutan yang dibedakan menjadi : hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah dan hutan pantai), hutan gambut, hutan rawa, hutan payau/mangrove, hutan tanaman, hutan rakyat, hutan kota dan lain-lain.
	(2) Topografi	<p>a) Ketinggian di atas permukaan laut</p> <p>b) Kelerengan</p> <p>c) Arah kelerengan</p> <p>d) Hamparan</p> <p>e) Amplitudo</p> <p>Apabila dimungkinkan digambarkan dalam unit DAS/Sub DAS</p>
	(3) Tanah	<p>Dilakukan pengamatan terhadap :</p> <p>a) Jenis tanah</p> <p>b) Warna tanah</p> <p>c) Tekstur tanah</p> <p>d) Tanah berbatu atau tidak</p> <p>e) Tingkat kerentanan terhadap erosi</p>
	(4) Tumbuhan non kayu	<p>a) Dilakukan pengukuran dan pencatatan parameter terhadap tumbuhan non kayu yang ada dalam plot seperti :</p> <p>(1) Rotan terdiri dari nama species, jumlah batang, jumlah rumpun, diameter (d), panjang (p) dan Berat basah (Bb) serta permudaannya.</p> <p>(2) Bambu terdiri dari nama species, jumlah batang, jumlah rumpun, tinggi untuk jenis monopodial serta permudaannya.</p> <p>(3) Sagu terdiri dari nama species, jumlah batang, diameter dan tinggi pohon bebas pelepah serta permudaannya.</p> <p>(4) Nipah terdiri dari nama species, jumlah batang, malai/tandan, buah dan tangkai daun serta permudaannya.</p> <p>b) Apabila diperlukan inventarisasi hutan khusus non kayu lainnya dapat dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan</p>
	e) Penyajian Hasil	a) Data pohon dan tingkat permudaannya terdiri dari : potensi (per jenis, kelompok jenis dan tegakan kayu), penyebaran, status kelangkaan, populasi dan nilai ekonomis tumbuhan

		non kayu.
		b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 100.000
	3) Inventarisasi Hutan Rakyat	Survei dan atau kompilasi hasil inventarisasi hutan rakyat.
	a) Metoda	Sampling dengan intensitas minimal 0,5%.
	b) Waktu Pelaksanaan	Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun.
	c) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan minimal skala 1 : 100.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG atau peta hasil pemetaan fotogrametris atau dengan teknologi lainnya.
	d) Lokasi plot	Penentuan lokasi sampling plot dilakukan dengan mengukur titik ikat dilapangan menggunakan GPS.
	e) Pengumpulan data dan informasi	Dilakukan melalui pengukuran, pengamatan dan pencatatan parameter serta pengumpulan data sekunder.
	(1)Pohon	<ul style="list-style-type: none"> a) Dikelompokkan pohon mulai diameter 10 cm keatas b) Dikelompokkan sesuai dengan kelas diameter minimal selang 5 cm dan jenis c) Dilakukan penomoran pohon d) Pencatatan nama lokal pohon, diameter dan tinggi pohon e) Pengambilan herbarium untuk jenis-jenis yang belum diketahui namanya f) Nilai ekonomis pohon
	(2)Permudaan/ anakan	<ul style="list-style-type: none"> a) Tingkat permudaan/anakan dikelompokkan menjadi semai dan pancang. b) Pencatatan nama lokal dan jumlah jenis. c) Pengambilan herbarium untuk jenis-jenis yang belum diketahui namanya. d) Untuk hutan rakyat mengikuti kelompok jenis dan kelas umur. e) Nilai ekonomis pohon
	(3)Topografi	<ul style="list-style-type: none"> a) Ketinggian di atas permukaan laut b) Kelerengan c) Aspek atau arah kelerengan d) Terrain atau Hamparan e) Amplitudo <p>Apabila dimungkinkan digambarkan dalam unit DAS/Sub DAS</p>
	(4)Tanah	<p>Dilakukan pengamatan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jenis tanah b) Warna tanah c) Tekstur tanah d) Tanah berbatu atau tidak e) Tingkat kerentanan terhadap erosi
	(5)Non kayu	<ul style="list-style-type: none"> a) Dilakukan pencatatan terhadap sumber daya hutan non kayu yang ada dalam plot seperti rotan, bambu, perlebahan, persuteraan alam, getah-getahan dan resin, biji-bijian/ buah, biofarmaka, minyak atsiri dan pangan alternatif lainnya b) Apabila diperlukan inventarisasi hutan khusus non kayu atau tumbuhan non kayu untuk jenis tertentu dapat dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan
	Penyajian Hasil	a) Potensi tegakan kayu

		<ul style="list-style-type: none"> b) Pengelompokan jenis kayu sesuai dengan permintaan pasar. c) Potensi sumber daya tumbuhan non kayu yang meliputi jenis/sub jenis, penyebaran, nilai ekonomis, populasi dan status kelangkaan. d) Keanekaragaman jenis pohon dan tumbuhan non kayu e) Struktur tegakan. f) Adanya aturan/pranata pengelolaan wilayah adat g) Macam dan bentuk-bentuk pengelolaan hutan rakyat. h) Aturan kehidupan masyarakat dalam hal pemanfaatan hasil hutan rakyat i) Struktur lembaga adat maupun lembaga lainnya j) Informasi DAS dan Sub DAS k) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat l) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 100.000 m) Untuk inventarisasi hutan non kayu dan sosial budaya yang dilakukan secara tersendiri dilaporkan secara terpisah per masing-masing kegiatan
	Pelaporan Hasil Inventarisasi Hutan Rakyat :	
	a. Isi Laporan	<p>Isi laporan minimal memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peta Pemandangan. b) Kata Pengantar ditandatangani oleh pimpinan instansi penyelenggara atau Pembina Penanggungjawab Kegiatan c) Susunan Tim. d) Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran. e) Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Pelaksanaan, Ruang Lingkup dan Batasan Istilah. f) Keadaan lokasi terdiri dari luas, letak, risalah, kondisi Biogeofisik, Kondisi sosekbud, informasi DAS/Sub DAS g) Metoda h) Hasil Pelaksanaan dan Pengolahan Data. i) Analisa j) Kesimpulan dan Saran k) Daftar Pustaka l) Lampiran antara lain peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 100.000.
	b. Arus Pelaporan	<ul style="list-style-type: none"> a) Hasil inventarisasi hutan rakyat tingkat kabupaten/kota dilaporkan kepada pemerintah provinsi (Dinas Kehutanan Provinsi) dengan tembusan BPDAS dan BPKH. b) BPDAS mengkompilasi hasil inventarisasi hutan rakyat untuk kepentingan perencanaan DAS/Sub DAS c) BPKH mengkompilasi hasil inventarisasi hutan rakyat untuk kepentingan informasi sumber daya hutan dan melaporkan ke Pusat.

	5) Inventarisasi Sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan	Survei dan atau kompilasi data hasil inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal/ masyarakat adat di sekitar kawasan hutan antara lain mengenai adat istiadat, pola ketergantungan terhadap hutan, pola kelembagaan dan infra struktur dari desa disekitar lokasi plot baik berupa data primer maupun sekunder.
	a) Metode	Survei lapangan atau kompilasi data menggunakan sampling/contoh, kegiatan lapangan melalui observasi, wawancara dan pencatatan/ perekaman, serta pengolahan dan analisa data.
	b) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi sosekbud masyarakat lokal/ masyarakat adat dan disajikan minimal skala 1 : 100.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG
	c) Penentuan lokasi sampling	Lokasi sampling adalah desa-desa yang berada di dalam dan di sekitar kawasan hutan.
	d) Pengumpulan data dan informasi	Dilaksanakan melalui pencatatan/perekaman data sekunder, pengamatan lapangan dan wawancara dengan responden terpilih menggunakan kuesioner dan atau pengumpulan data sekunder.
	e) Penyajian Hasil	a) Data dan hasil analisa sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar hutan b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 100.000.
2.	Data dan informasi hasil inventarisasi hutan tingkat Kabupaten/Kota	a) Keadaan status dan fungsi kawasan hutan b) kondisi fisik kawasan hutan antara lain topografi, tanah, dan iklim. c) Informasi DAS dan SUB DAS. d) Keadaan penutupan lahan. e) Potensi sumberdaya hutan pada hutan alam dan hutan tanaman, hutan rakyat dan hutan kota berupa kayu/pohon dan tingkat permudaannya meliputi jenis dan pengelompokan kayu (seperti jenis niagawi, kelas diameter dan lain-lain), volume pohon/massa tegakan, jumlah batang, penyebaran, struktur tegakan, status kelangkaan dan populasi. f) Potensi sumberdaya hutan tumbuhan non kayu meliputi jenis dan pengelompokan jenis, volume/berat, jumlah batang/ rumpun, penyebaran, status kelangkaan, populasi dan nilai ekonomis tumbuhan non kayu termasuk hutan rakyat. g) Potensi satwa liar meliputi jenis/sub jenis, pengelompokan jenis antara lain berdasarkan perlindungan jenis satwa liar, penyebaran, status kelangkaan dan populasi baik in situ maupun eks situ. h) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan. i) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 100.000.
3.	Pelaporan	
	a. Isi Pelaporan	Isi laporan minimal memuat : a) Peta Pemandangan. b) Kata Pengantar ditandatangani oleh pimpinan instansi

		penyelenggara atau Pembina Penanggungjawab Kegiatan c) Susunan Tim. d) Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran. e) Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Pelaksanaan, Ruang Lingkup dan Batasan Istilah. f) Keadaan kawasan terdiri dari lokasi (luas dan letak), risalah kawasan, kondisi Biogeofisik, Kondisi sosekbud g) Metoda h) Hasil Pelaksanaan dan Pengolahan Data. i) Analisa j) Kesimpulan dan Saran k) Daftar Pustaka l) Lampiran antara lain peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 250.000.
	b. Arus Pelaporan	a) Hasil inventarisasi hutan tingkat kabupaten/kota dilaporkan kepada pemerintah provinsi cq Dinas Provinsi b) Balai Pemantapan Kawasan Hutan mengkompilasi hasil inventarisasi hutan yang dilaksanakan oleh Dinas Kabupaten/Kota untuk dilaporkan ke Pusat

IV. INVENTARISASI HUTAN TINGKAT DAERAH ALIRAN SUNGAI/ SUB DAERAH ALIRAN SUNGAI

1. Sasaran/Obyek Kegiatan : Kawasan hutan dan Areal Penggunaan Lain (luar kawasan hutan) dalam wilayah Daerah Aliran Sungai/ Sub Daerah Aliran Sungai
2. Penanggung jawab : 1. Menteri Kehutanan untuk DAS/Sub DAS lintas Propinsi,
2. Gubernur untuk DAS/Sub DAS lintas Kabupaten/Kota,
3. Bupati/Walikota untuk DAS/Sub DAS dalam wilayah kabupaten/kota

Pengendalian dan Pembinaan : 1. Badan Planologi Kehutanan untuk tingkat Propinsi
2. Dinas Propinsi untuk tingkat Kabupaten/Kota,
3. Penyelenggara : 1. DAS/Sub DAS lintas Propinsi, diselenggarakan oleh Badan Planologi atau Eselon I yang menangani DAS/Sub DAS, Departemen Kehutanan
2. DAS/Sub DAS lintas Kabupaten/Kota, diselenggarakan oleh Dinas Propinsi
3. DAS dalam wilayah kabupaten/kota, diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten/Kota

NO.	KRITERIA	STANDAR
	Pelaksanaan :	
1.	Waktu Pelaksanaan	a) Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun b) Kurang dari 5 tahun apabila terjadi perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata
a.	Penginderaan Jauh	Citra satelit dan non satelit dengan resolusi sangat tinggi (1-4) m atau tinggi (4-10) m atau sedang (10-50) m

	1) Spesifikasi Citra	<p>Spesifikasi Citra yang Digunakan sbb :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Format data Geo tiff, atau format lain sesuai ketentuan yang berlaku b) Koreksi : Telah dikoreksi secara geomatrik dan radiomatrik c) Datum : WGS 84 d) Sistem Koordinat : UTM (Universal Transverse Mercator), disertai sistem koordinat geografis e) Media perekaman data : CD ROM, DVD atau jenis media lain sesuai perkembangan teknologi f) Liputan : 2 tahun terakhir g) Tutupan awan : $\leq 10\%$, kecuali apabila selama 2 tahun terakhir tidak tersedia citra dengan tutupan awan maksimum $\leq 10\%$
	2) Metode	<p>Penafsiran citra dilakukan sebagai berikut :</p> <p>Kelas Penutupan Lahan :</p> <p>Kelas penutupan lahan yang digunakan sesuai kelas penutupan lahan yang ditetapkan Badan Planologi Kehutanan. Klasifikasi dilakukan secara :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Manual : <ul style="list-style-type: none"> (1) delinasi pada citra dilayar komputer (on screen digitizing/semi digital) (2) delinasi pada citra hardcopy/cetakan yang sudah dikoreksi secara orthogonal b) Digital : <p>Klasifikasi ulang :</p> <p>Untuk memperbaiki hasil klasifikasi pendahuluan, dilakukan klasifikasi ulang berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan atau data sekunder yang tersedia.</p>
	3) Verifikasi Data	<ul style="list-style-type: none"> a) Verifikasi data hasil penafsiran dilakukan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> (1) Peninjauan langsung ke lapangan (ceking lapangan). Besarnya intensitas sampling dalam pelaksanaan cheking lapangan ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian yang diinginkan, minimal satu sample pada setiap kelas penutupan lahan. (2) Merujuk hasil penafsiran citra lain yang memiliki resolusi lebih tinggi (memiliki tingkat akurasi dan nilai kebenaran lebih baik) (3) Merujuk pada data sekunder dengan standar yang sesuai b) Tingkat kebenaran/ akurasi hasil penafsiran dihitung dan disajikan berdasarkan data hasil cheking lapangan dan atau berdasarkan data sekunder yang digunakan
	4) Pengelolaan data	<p>Badan Planologi Kehutanan menyusun basis data citra dan data spasial Departemen Kehutanan, dengan demikian setiap unit kerja yang melaksanakan kegiatan inventarisasi penginderaan jauh menggunakan data citra atau teknologi penginderaan jauh agar :</p>

		<ul style="list-style-type: none"> a) Menyerahkan copy data citra dan data spasial hasil kegiatan yang dimiliki kepada Badan Planologi Kehutanan untuk dimasukkan ke basis data Departemen Kehutanan b) Data digital citra satelit dan data spasial disimpan dalam format dan media penyimpan yang telah ditetapkan dan dibuat rangkap sebagai back up
	5) Penyajian Hasil	Peta penutupan lahan dengan skala minimal 1 : 250.000 dan data non spasial sebagai produk ikutan.
b.	Inventarisasi Terrestris	Dilakukan melalui survei atau kompilasi data hasil inventarisasi hutan atau kombinasi antara survei dan kompilasi.
	1) Metoda	<ul style="list-style-type: none"> a) Kompilasi data hasil inventarisasi hutan tingkat nasional, propinsi, kabupaten/kota, unit pengelolaan dan atau inventarisasi khusus lainnya sesuai dengan tingkat intensitas sampling masing-masing. b) Survei lapangan dengan melakukan pengumpulan dan pengukuran parameter DAS/Sub DAS
	2) Waktu Pelaksanaan	<ul style="list-style-type: none"> a) Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun b) Kurang dari 5 tahun apabila terjadi perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata
	3) Pengumpulan data dan informasi	<p>Pengumpulan dan pengukuran parameter DAS/Sub DAS adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Identifikasi karakteristik lahan antara lain topografi, kelerengan, iklim (curah hujan, temperatur, kelembaban, angin), jenis tanah dan batuan, sumber mata air, sungai dan anak sungai, danau terhadap bentuk DAS/Sub DAS (memanjang, melebar atau bujur sangkar) dan posisi dalam DAS/Sub DAS (hulu, tengah, hilir) b) Identifikasi kelas penutupan lahan c) Identifikasi sosial-ekonomi dan budaya masyarakat
	4) Penyajian Hasil	<ul style="list-style-type: none"> a) Data dan hasil analisa kondisi sumber daya alam DAS/Sub DAS b) Arahan pengelolaan sumberdaya alam DAS/Sub DAS c) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 100.000
2.	Pelaporan	
	a. Isi Laporan	<p>Isi laporan minimal memuat :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Peta Pemandangan. b) Kata Pengantar ditandatangani oleh pimpinan instansi penyelenggara atau Pembina Penanggungjawab Kegiatan c) Susunan Tim. d) Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran. e) Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Pelaksanaan, Ruang Lingkup dan Batasan Istilah. f) Keadaan kawasan terdiri dari lokasi(luas dan letak), risalah kawasan, kondisi Biogeofisik, Kondisi sosekbud g) Metoda h) Hasil Pelaksanaan dan Pengolahan Data. i) Analisa j) Arahan pengelolaan sumberdaya alam DAS/Sub DAS

		k) Daftar Pustaka l) Lampiran antara lain peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 100.000.
	b. Arus Pelaporan	a) Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota melaporkan hasil kepada Dinas Kehutanan Provinsi, BPDAS dan BPKH b) Dinas Kehutanan Propinsi, BPDAS dan BPKH melaporkan hasil kepada Kepala Badan Planologi atau Dirjen yang menangani DAS.

V. INVENTARISASI HUTAN TINGKAT UNIT PENGELOLAAN

1. Sasaran/Obyek Kegiatan :
 1. Unit Pengelolaan (UP) Kawasan Hutan Konservasi (CA, SM, TN, TWA, TAHURA dan TB), UP Hutan Lindung (KPHL) dan UP Hutan Produksi (KPHP)
 2. Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) pada Hutan Alam
 3. Areal Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan pada Hutan Tanaman
2. Penanggung jawab : Institusi Pengelola
3. Pengendalian dan Pembinaan :
 1. Unit pengelolaan yang lintas propinsi, diselenggarakan oleh Badan Planologi Kehutanan
 2. Unit pengelolaan yang lintas kabupaten/kota, diselenggarakan oleh Dinas Provinsi
 3. Unit pengelolaan dalam wilayah kabupaten/kota, diselenggarakan oleh Dinas Kabupaten/kota
3. Penyelenggara : Unit Pengelola

NO.	KRITERIA	STANDAR
	Pelaksanaan	
1.	Waktu Pelaksanaan	a) Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun b) Kurang dari 5 tahun apabila terjadi perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata
a.	Penginderaan Jauh	Citra satelit dan non satelit dengan resolusi sangat tinggi (1-4) m atau tinggi (4-10) m atau sedang (10-50) m
	1) Spesifikasi Citra	Spesifikasi Citra yang Digunakan sbb : <ol style="list-style-type: none"> a) Format data Geo tiff, atau format lain sesuai ketentuan yang berlaku b) Koreksi : Telah dikoreksi secara geomatrik dan radiomatrik c) Datum : WGS 84 d) Sistem Koordinat : UTM (Universal Transverse Mercator), disertai sistem koordinat geografis e) Media perekaman data : CD ROM, DVD atau jenis media lain sesuai perkembangan teknologi f) Liputan : 2 tahun terakhir g) Tutupan awan : $\leq 10\%$, kecuali apabila selama 2 tahun terakhir tidak tersedia citra dengan tutupan awan maksimum $\leq 10\%$
	2) Metode	Penafsiran citra dilakukan sebagai berikut : Kelas Penutupan Lahan :

		<p>Kelas penutupan lahan yang digunakan sesuai kelas penutupan lahan yang ditetapkan Badan Planologi Kehutanan. Klasifikasi dilakukan secara :</p> <p>a) Manual :</p> <p>(1) delinasi pada citra dilayar komputer (on screen digitizing/semi digital)</p> <p>(2) delinasi pada citra hardcopy/cetakan yang sudah dikoreksi secara orthogonal</p> <p>b) Digital :</p> <p>Klasifikasi ulang :</p> <p>Untuk memperbaiki hasil klasifikasi pendahuluan, dilakukan klasifikasi ulang berdasarkan hasil pengecekan lapangan dan atau data sekunder yang tersedia.</p>
	3) Verifikasi Data	<p>a) Verifikasi data hasil penafsiran dilakukan dengan cara :</p> <p>(1) Peninjauan langsung ke lapangan (ceking lapangan). Besarnya intensitas sampling dalam pelaksanaan cheking lapangan ditentukan berdasarkan tingkat ketelitian yang diinginkan, minimal satu sample pada setiap kelas penutupan lahan.</p> <p>(2) Merujuk hasil penafsiran citra lain yang memiliki resolusi lebih tinggi (memiliki tingkat akurasi dan nilai kebenaran lebih baik)</p> <p>(3) Merujuk pada data sekunder dengan standar yang sesuai</p> <p>b) Tingkat kebenaran/ akurasi hasil penafsiran dihitung dan disajikan berdasarkan data hasil cheking lapangan dan atau berdasarkan data sekunder yang digunakan</p>
	4) Pengelolaan data	<p>Badan Planologi Kehutanan menyusun basis data citra dan data spasial Departemen Kehutanan, dengan demikian setiap unit kerja yang melaksanakan kegiatan inventarisasi penginderaan jauh menggunakan data citra atau teknologi penginderaan jauh agar :</p> <p>a) Menyerahkan copy data citra dan data spasial hasil kegiatan yang dimiliki kepada Badan Planologi Kehutanan untuk dimasukkan ke basis data Departemen Kehutanan</p> <p>b) Data digital citra satelit dan data spasial disimpan dalam format dan media penyimpan yang telah ditetapkan dan dibuat rangkap sebagai back up</p>
	5) Penyajian Hasil	Peta penutupan lahan dengan skala minimal 1 : 100.000 dan data non spasial sebagai produk ikutan.
b.	Inventarisasi Terrestis	
	1) Inventarisasi Sumber Daya Hutan Kayu	Survei dan atau kompilasi hasil data inventarisasi pohon dan tingkat permudaannya yang ada dalam petak ukur
	a) Metoda	<p>Sampling dan atau sensus</p> <p>a) Inventarisasi hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi : cara sampling minimal intensitas 1%</p> <p>b) Inventarisasi hutan tanaman cara sampling minimal intensitas 0,5%, variasi intensitas sampling tergantung kelas umur</p>

	b) Waktu Pelaksanaan	Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun.
	c) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan dalam skala lebih besar dari 1 : 100.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG atau peta hasil pemetaan fotogrametris atau dengan teknologi lainnya.
	d) Lokasi plot	Penentuan lokasi plot dilakukan dengan menggunakan koordinat GPS, titik ikat, aksesibilitas/ cara pencapaian plot.
	e) Pengumpulan data dan informasi	Dilakukan melalui : pengukuran, pengamatan dan pencatatan parameter di lapangan dan pengumpulan data sekunder.
	(1) Tipe Hutan	Pengamatan terhadap tipe hutan yang dibedakan menjadi : hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah dan hutan pantai), hutan gambut, hutan rawa, hutan payau/mangrove, hutan tanaman.
	(2) Pohon	<ul style="list-style-type: none"> a) Dikelompokkan sebagai pohon jika berdiameter 20 cm keatas b) Dilakukan penomoran pohon d) Pencatatan nama lokal pohon, diameter dan tinggi pohon, tinggi bebas cabang e) Pengambilan herbarium untuk jenis-jenis yang belum diketahui namanya f) Untuk hutan tanaman mengikuti kelompok jenis dan kelas umur
	(3) Tingkat Permudaan/ anakan	<ul style="list-style-type: none"> a) Tingkat permudaan/anakan dikelompokkan menjadi semai, pancang dan tiang. b) Pencatatan nama lokal dan jumlah jenis untuk semai dan pancang. c) Pencatatan nama lokal, diameter, dan jumlah jenis untuk tingkat tiang. d) Untuk hutan tanaman mengikuti kelompok jenis dan kelas umur. <p>Mengacu kriteria dan standar Inventarisasi Hutan Nasional</p>
	(4) Topografi	<ul style="list-style-type: none"> a) Ketinggian di atas permukaan laut b) Kelerengan c) Arah kelerengan d) Hamparan e) Amplitudo <p>Apabila dimungkinkan digambarkan dalam unit DAS/Sub DAS</p>
	(5) Tanah	<p>Dilakukan pengamatan terhadap :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Jenis tanah b) Warna tanah c) Tekstur tanah d) Tanah berbatu atau tidak e) Tingkat kerentanan terhadap erosi
	2) Inventarisasi tumbuhan non kayu	Survei dan atau kompilasi hasil inventarisasi tumbuhan non kayu yang ada dalam petak ukur seperti rotan, sagu, bambu, nipah dan lain-lain.
	a) Metoda	<ul style="list-style-type: none"> a) Bentuk plot : lingkaran atau persegi empat. b) Cara sampling : <ul style="list-style-type: none"> (1) Inventarisasi tumbuhan non kayu yang dilakukan

		<p>sekaligus inventarisasi sumberdaya hutan kayu, intensitas samplingsnya mengikuti petak ukur inventarisasi sumber daya hutan kayu.</p> <p>(2) Inventarisasi tumbuhan non kayu yang dilakukan secara khusus menggunakan intensitas sampling :</p> <p>(a) rotan, minimal intensitas sampling 0,5%.</p> <p>(b) bambu, minimal intensitas sampling 0,05%.</p> <p>(c) sagu, minimal intensitas sampling 2%.</p> <p>(d) nipah, minimal intensitas sampling 0,05%.</p> <p>c) Sampling tumbuhan non kayu lainnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan</p> <p>d) Mengacu pada pedoman Inventarisasi Hutan Nasional</p>
	b) Waktu Pelaksanaan	<p>a) Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun</p> <p>b) Kurang dari 5 tahun apabila terjadi perubahan kondisi sumber daya hutan yang nyata</p>
	c) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan minimal dalam skala 1 : 100.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG.
	d) Lokasi Plot	Penentuan lokasi sampling plot dilakukan dengan mengukur koordinat titik ikat dilapangan menggunakan GPS
	e) Pengumpulan data dan informasi	Dilaksanakan melalui : pengukuran, pengamatan dan pencatatan parameter di lapangan serta pengumpulan data sekunder.
	(1) Tipe Hutan	Pengamatan terhadap tipe hutan yang dibedakan menjadi : hutan tanah kering, hutan gambut, hutan rawa, hutan payau/ mangrove, hutan pantai, hutan tanaman
	(2) Topografi	<p>a) Ketinggian di atas permukaan laut</p> <p>b) Kelerengan</p> <p>c) Arah kelerengan</p> <p>d) Hamparan</p> <p>e) Amplitudo</p> <p>Apabila dimungkinkan digambarkan dalam unit DAS/Sub DAS</p>
	(3) Tanah	<p>Dilakukan pengamatan terhadap :</p> <p>a) Jenis tanah</p> <p>b) Warna tanah</p> <p>c) Tekstur tanah</p> <p>d) Tanah berbatu atau tidak</p> <p>e) Tingkat kerentanan terhadap erosi</p>
	(4) Tumbuhan non kayu	<p>a) Dilakukan pengukuran dan pencatatan parameter terhadap tumbuhan non kayu yang ada dalam plot seperti :</p> <p>(1) Rotan terdiri dari nama species, jumlah batang, jumlah rumpun, diameter (d), panjang (p) dan Berat basah (Bb) serta permudaannya.</p> <p>(2) Bambu terdiri dari nama species, jumlah batang, jumlah rumpun, tinggi untuk jenis monopodial serta permudaannya.</p> <p>(3) Sagu terdiri dari nama species, jumlah batang, diameter dan tinggi pohon bebas pelepah serta permudaannya.</p> <p>(4) Nipah terdiri dari nama species, jumlah batang, malai/ tandan, buah dan tangkai daun serta permudaannya.</p> <p>b) Apabila diperlukan inventarisasi hutan khusus non kayu</p>

		lainnya dapat dilaksanakan sesuai pedoman yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Badan Planologi Kehutanan
	3) Inventarisasi Satwa Liar	Data survei lapangan dan/atau kompilasi hasil inventarisasi satwa liar
	a) Metode	Kompilasi hasil identifikasi dan inventarisasi terhadap potensi jenis, penyebaran, status kelangkaan, populasi, dan habitat satwa liar
	b) Waktu Pelaksanaan	Dilaksanakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 5 tahun
	c) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan dalam peta skala terbesar yang tersedia minimal dalam skala 1 : 250.000, yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG atau Peta Dasar Kehutanan.
	d) Penentuan lokasi petak ukur	Penentuan lokasi petak ukur dilakukan dengan mengukur koordinat titik ikat dilapangan menggunakan GPS, atau mengukur ikatan ke titik pasti misalnya titik triangulasi.
	e) Pengumpulan data dan informasi	Dilaksanakan melalui : pengukuran, pengamatan dan pencatatan data primer dan atau pengumpulan data sekunder.
	(1) Tipe Ekosistem	Pengamatan terhadap tipe ekosistem yang dibedakan menjadi : hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, hutan pantai), hutan gambut, hutan rawa, hutan payau/mangrove dan kawasan perairan.
	(2) Jenis Satwa Liar	Dilakukan pencatatan terhadap jenis, ukuran, jenis kelamin, usia dan kelompok famili satwa liar berikut data identifikasi jenis yang meliputi ukuran dan warna spesifik.
	(3) Penyebaran satwa Liar	Dilakukan pencatatan terhadap posisi perjumpaan untuk penyebaran dari jenis satwa liar dan bila memungkinkan dapat diplotkan dalam peta
	(4) Status kelangkaan	Dilakukan pencatatan terhadap status kelangkaan yang dikaitkan dengan kelimpahan dari populasi
	(5) Topografi	Dilakukan pencatatan terhadap ketinggian di atas permukaan laut dan kelerengan
	(6) Habitat	Kondisi habitat, iklim, suhu, kelembaban, prosentase penutupan tajuk
	f) Penyajian Hasil	a) Data satwa liar terdiri dari : potensi per jenis, keanekaragaman jenis, penyebaran termasuk status kelangkaan dan informasi habitat (antara lain sarang dan daerah jelajah), seks ratio b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 1.000.000.
	4) Inventarisasi Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat di Sekitar Kawasan Hutan	Survei dan atau kompilasi data hasil inventarisasi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat lokal/ masyarakat adat di dalam dan di sekitar kawasan hutan antara lain mengenai adat istiadat, pola ketergantungan terhadap hutan, pola kelembagaan, infra struktur dari desa disekitar lokasi plot baik berupa data primer maupun sekunder.
	a) Metode	Survei lapangan atau kompilasi data menggunakan sampling/ contoh, kegiatan lapangan melalui observasi, wawancara dan pencatatan/ perekaman, serta pengolahan dan analisa data.
	b) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi sosbud masyarakat lokal/masyarakat adat dan disajikan minimal skala 1 : 100.000 yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG.
	c) Penentuan lokasi sampling	Lokasi sampling adalah desa-desa yang berada di dalam dan di sekitar Unit Pengelolaan Hutan
	d) Pengumpulan data dan	Dilaksanakan melalui pencatatan/perekaman data sekunder,

	informasi	pengamatan lapangan dan wawancara dengan responden terpilih menggunakan kuesioner dan atau pengumpulan data sekunder.
	e) Penyajian Hasil	a) Data dan hasil analisa sosial, ekonomi dan budaya masyarakat di sekitar kawasan hutan. b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 100.000
	5) Inventarisasi Obyek Wisata dan Jasa Lingkungan	Data survei dan/atau kompilasi data inventarisasi hutan yang berkaitan dengan potensi kawasan dan jasa lingkungan
	a) Metode	a) Studi literatur melalui kajian analisa data sekunder, atau b) Survei lapangan dengan melakukan pengukuran dan pencatatan parameter, dan atau melakukan wawancara dari narasumber
	b) Peta Kerja	Peta yang dapat menggambarkan kondisi lapangan dan disajikan dalam peta skala terbesar yang tersedia minimal dalam skala 1 : 250.000, yang bersumber pada salah satu peta dasar berikut (dengan urutan prioritas) : peta rupa bumi Indonesia atau peta topografi atau peta JOG atau peta dasar kehutanan.
	c) Sasaran Potensi	Sasaran potensi kawasan dan jasa lingkungan antara lain : a) Potensi kawasan; b) Wisata alam; c) Potensi keanekaragaman hayati d) Potensi sumberdaya air; e) Potensi carbon offset; f) Potensi obyek olah raga tantangan; g) Potensi wisata religius; dan atau h) Potensi obyek penelitian
	d) Pengumpulan data dan informasi	Dilaksanakan melalui : pengukuran, pengamatan dan pencatatan parameter di lapangan, wawancara dengan narasumber dan atau pengumpulan data sekunder.
	(1) Tipe Ekosistem	Deskripsi keunikan dan kekhasan ekosistem yang dibedakan menjadi : hutan lahan kering (hutan pegunungan, hutan dataran tinggi, hutan dataran rendah, hutan pantai), hutan gambut, hutan rawa, hutan payau/mangrove, muara sungai (estuari), karst dan perairan (laut, danau dan waduk)
	(2) Keanekaragaman hayati	Deskripsi keunikan dan kekhasan flora dan fauna antara lain : a) Flora : (1) nama jenis/species, nama lokal, diameter dan tinggi pohon dan jumlah permudaan. Bila jenis/species belum dikenal dibuatkan herbarium. (2) sebaran dan habitat, status kelangkaan dan populasi jenis (3) Struktur dan kondisi tegakan (4) Informasi tumbuhan non kayu, tumbuhan obat-obatan dan tumbuhan lain yang mempunyai nilai ekonomis dan bermanfaat untuk kepentingan jasa lingkungan b) Fauna : (1) nama jenis/species dan pengelompokan jenis berdasarkan kelas (mamalia, reptilia, aves dan primata) (2) sebaran dan habitat, status kelangkaan dan populasi jenis

		(3) kondisi satwa
	(3) Fenomena alam	Deskripsi jumlah dan keunikan/keindahan alam/gejala alam antara lain : a) Gua b) Air terjun c) Mata air dan sungai d) Danau e) Pantai dan laut f) Gunung/lembah
	(4) Pengelolaan kawasan	a) Sejarah kawasan b) Nilai konservasi c) Aksesibilitas
	(5) Sosial, ekonomi dan budaya masyarakat	Deskripsi potensi masyarakat di sekitar kawasan hutan, antara lain : a) Adat dan istiadat; b) Mata pencaharian; c) Pendidikan dan ketrampilan; dan d) Infra struktur dan aksesibilitas
	(6) Topografi	Dilakukan pengukuran/pengamatan/pencatatan terhadap : a) Ketinggian di atas permukaan laut b) Kelerengan c) Arah kelerengan d) Hamparan/ Amplitudo Apabila dimungkinkan digambarkan dalam unit DAS/Sub DAS
	(7) Tanah	Dilakukan pengamatan terhadap : a) Jenis tanah b) Warna tanah c) Tekstur tanah d) Tanah berbatu atau tidak e) Tingkat kerentanan terhadap erosi
	e) Penyajian Hasil	a) Potensi sumberdaya alam kawasan hutan yang dapat menggambarkan kepentingan antara lain pemanfaatan tumbuhan obat-obatan, tumbuhan non kayu, wisata alam, keanekaragaman hayati, sumberdaya air, carbon offset, obyek olahraga tantangan, wisata religius atau obyek penelitian b) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 100.000
2.	Penyajian Data dan Informasi Unit Pengelolaan Hutan Tanaman	a) Data Pokok : (1) Data luas tanaman per kelas umur per jenis (2) Data potensi per Ha menurut kelas umur dan menurut jenis (3) Data tingkat keberhasilan tanaman per jenis (4) Data riap tanaman per jenis (5) Hama dan penyakit (6) Informasi hasil hutan non kayu (7) Keberadaan fauna dan habitatnya (8) Keberadaan kawasan lindung/ konservasi (9) Jaringan jalan (10) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 100.000 b) Data penunjang : (1) Infra struktur yang mendukung pengelolaan hutan (2) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat (3) Informasi kondisi DAS/Sub DAS
3.	Penyajian Data dan Informasi Unit	a) Potensi tegakan kayu

	<p>Pengelolaan Hutan Alam (hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi)</p>	<ul style="list-style-type: none"> b) Potensi sumber daya tumbuhan non kayu yang meliputi jenis/sub jenis, penyebaran, populasi dan status c) Keanekaragaman jenis pohon d) Riap tegakan untuk plot-plot permanent apabila telah dilakukan pengukuran berulang e) Potensi jenis/sub jenis, habitat, penyebaran, populasi dan status f) Pengelompokan jenis satwa yang dilindungi sesuai dengan Peraturan Pemerintah baik pusat maupun daerah g) Macam dan bentuk-bentuk pengelolaan hutan h) Peta hasil kegiatan skala 1 : 250.000 atau skala 1 : 100.000 atau 1 : 50.000 disesuaikan dengan luas wilayah i) Informasi DAS dan Sub DAS
	<p>Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK) pada Hutan Alam</p>	<ul style="list-style-type: none"> a) Potensi Hutan untuk RKUPHHK : <ul style="list-style-type: none"> (1) Hutan primer diperinci per jenis dan per kelas diameter (2) Hutan bekas tebangan diperinci per jenis dan per kelas diameter b) Potensi Hutan untuk RKLUPHHK : <ul style="list-style-type: none"> (1) Potensi <ul style="list-style-type: none"> (a) Hutan primer diperinci per jenis dan per kelas diameter (b) Hutan bekas tebangan diperinci per jenis dan per kelas diameter (c) Rekapitulasi potensi blok RKL (2) Data permudaan hutan : tingkat anakan, tingkat pancang dan tingkat tiang (3) Administrasi <ul style="list-style-type: none"> (a) Berita Acara Pemeriksaan/Ceking (b) Pengesahan Rekapitulasi LHC (c) Blok RKL/Rintis Batas Blok c) Potensi (RKTUPHH) : <ul style="list-style-type: none"> (1) Potensi <ul style="list-style-type: none"> (a) Hutan primer (rapat, sedang dan jarang) diperinci per jenis dan per kelas diameter dan per petak/blok (b) Hutan bekas tebangan diperinci per jenis dan per kelas diameter dan per petak/blok (c) Rekapitulasi potensi blok RKT (2) Data permudaan hutan : tingkat anakan, tingkat pancang dan tingkat tiang (3) Administrasi <ul style="list-style-type: none"> (a) Berita Acara Pemeriksaan/Ceking (b) Pengesahan Rekapitulasi LHC

		<p>(c) Blok RKT/Rintis Batas Blok</p> <p>d) Peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 50.000</p> <p>e) Informasi mengenai hasil hutan non kayu</p> <p>f) Keberadaan fauna dan habitatnya</p>
2.	Pelaporan	
	a. Isi Laporan	<p>Isi laporan minimal memuat :</p> <p>a) Peta Pemandangan.</p> <p>b) Kata Pengantar ditandatangani oleh pimpinan instansi penyelenggara atau Pembina Penanggungjawab Kegiatan</p> <p>c) Susunan Tim.</p> <p>d) Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran.</p> <p>e) Pendahuluan terdiri dari Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Pelaksanaan, Ruang Lingkup dan Batasan Istilah.</p> <p>f) Keadaan kawasan terdiri dari lokasi(luas dan letak), risalah kawasan, kondisi Biogeofisik, Kondisi sosekbud</p> <p>g) Metoda</p> <p>h) Hasil Pelaksanaan dan Pengolahan Data.</p> <p>i) Analisa</p> <p>j) Rencana Pengelolaan Sumberdaya Hutan</p> <p>k) Daftar Pustaka</p> <p>l) Lampiran antara lain peta hasil kegiatan minimal skala 1 : 100.000.</p>
	b. Arus Pelaporan	<p>a) Unit Pengelola pada hutan produksi dan hutan lindung melaporkan kepada Ditjen Bina Produksi Kehutanan, Badan Planologi Kehutanan, Dinas Provinsi, Dinas Kabupaten/ Kota, dan BPKH</p> <p>b) Unit Pengelola pada hutan konservasi melaporkan kepada Ditjen PHKA, Badan Planologi Kehutanan dan BPKH</p>

MENTERI KEHUTANAN,

Ttd

H. M. S. KABAN